Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM LINGKUNGAN TINGGAL DAN BELAJAR AMAN UNTUK MENDORONG PENCAPAIAN CITA-CITA ANAK PRA-SEJAHTERA DI KOTA SURABAYA

Diva Adelia Bamar[1], Dr. Dra. Rachmawati Novaria,MM[2], Dida Rahmadanik, S.AP. M.AP[3]
[123] Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

adeliabamar@gmail.com
nova@untag-sby.ac.id
didarahma@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) dianggap sebagai alternatif atau solusi yang disesuaikan dengan kondisi Kota Surabaya, terutama mengingat keterbatasan lahan untuk membangun program seperti Sekolah Rakyat (SR). Berdasarkan Perwali Surabaya Nomor 119 Tahun 2021 mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Kehadiran RIAS didorong oleh upaya Pemkot untuk menyediakan alternatif solusi pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak pra-sejahtera. Studi ini mengimplementasikan kebijakan dalam memberikan penanganan untuk mendorong pencapaian cita-cita anak pra-sejahtera di Kota Surabaya, dengan mengacu pada kriteria model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi para pelaksana dan struktur birokrasi. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan untuk para anak pra-sejahtera telah dilaksanakan dan terus dikembangkan guna untuk mensejahterakan bagi anak pra-sejahtera dari keluarga kurang mampu. Namun, masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pada keterbatasan sumber daya kurang adanya transparansi jumlah pembina atau pendamping di RIAS.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, RIAS, Anak Pra-sejahtera

A B S T R A C T

RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) is considered an alternative or solution adapted to the conditions of Surabaya City, especially considering the limited land for building programs such as the People's School (SR). Based on Surabaya Mayoral Regulation Number 119 of 2021, it regulates the Formation and Organizational Structure of the Technical Implementation Unit of the Public Children's Village Service within the Surabaya City Social Service. The presence of RIAS was driven by the City Government's efforts to provide alternative boarding-based education solutions for underprivileged children. This study implements policies in providing handling to encourage the achievement of the ideals of underprivileged children in Surabaya City, by referring to the criteria of the policy implementation model of George C. Edwards III (1980), including communication, resources, disposition of implementers and bureaucratic structure. Using qualitative research methods, data were collected from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the guidance policy for underprivileged children has been implemented and continues to be developed to improve the welfare of underprivileged children from underprivileged families. However, there are still inhibiting factors in policy implementation, such as limited resources and a lack of transparency regarding the number of mentors or assistants at RIAS.

Keywords: *Policy Implementation, RIAS, Underprivileged Children*

*Corresponding author
E-mail addresses: adeliabamar@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. PENDAHULUAN

Masalah sosial tidak hanya mempengaruhi sekelompok individu, tetapi juga berdampak luas pada keseimbangan dan kesejahteraan kelompok sosial. Masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan, sehingga salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi hingga saat ini dan perlu di perhatikan yaitu permasalahan pada anak kurang beruntung dalam lingkungannya ialah anak dari keluarga Pra-Sejahtera.

Fenomena adanya anak pra-sejahtera merupakan persoalan sosial yang kompleks karena banyaknya faktor yang mempengaruhi. Kondisi anak pra-sejahtera yang rentan dan memprihatinkan, ditandai karena adanya faktor perekonomian yang menyebabkan kemiskinan, ketidakmampuan dan ketidakstabilan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan mereka. Kehidupan mereka yang mengharuskan ikut bekerja diusia yang sangat muda menempatkan mereka akan risiko yang tinggi, termasuk dapat menjadi korban kekerasan, eksploitasi, serta rentan mengalami masalah kesehatan fisik dan mental akibat kondisi hidup di dunia luar tanpa adanya pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Arti dalam UUD 1945 tersebut yaitu, negara bertanggung jawab untuk memastikan memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak yang ditelantarkan, anak rentan miskin termasuk ke dalam kategori anak yang terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhannya dan menjadikan tanggung jawab negara. Anak prasejahtera pada hakikatnya merupakan korban dari fenomena sosial sebagai efek samping dari ketidakpastian dalam pembangunan yang terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang terlalu memusat diberbagai daerah salah satunya di perkotaan. Faktor yang menyebabkan anak rentan miskin yaitu karena adanya masalah ekonomi yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya mengatasi fenomena anak-anak rentan miskin yang memerlukan perhatian khusus. Melalui pendekatan humanisme dan kolaborasi antar instansi, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani permasalahan sosial yang melibatkan anak-anak khususnya rentan miskin. Dinas Sosial Kota Surabaya bersama berbagai pihak terus berupaya menangani masalah anak jalanan, termasuk melalui program seperti "Kampung Anak Negeri" yang berperan dalam memberikan program untuk anak pra-sejahtera. Dinas sosial Kota Surabaya dapat menjadi jembatan dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



meningkatkan keterampilan anak-anak rentan miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Jadi dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan hak dan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat termasuk anak rentan miskin atau anak pra-sejahtera.

UPTD adalah organisasi di bawah Dinas atau Badan Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang tertentu. Tujuan dibentuknya UPTD adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di daerah dengan adanya unit yang khusus menangani tugas-tugas teknis tertentu. Untuk melaksanakan tugas pelayanan sosial di bidang pembinaan, pengembangan dan pelayanan bagi anak yang bermasalah secara sosial telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Memberikan program pendidikan dan lingkungan tinggal yang aman untuk anak prasejahtera merupakan salah satu peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial. Sehubungan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya, maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021. UPTD ini dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial anak di lingkungan Dinas Sosial Kota Surabaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) yang dikutip oleh Leo Agustino (2006:6), kebijakan publik adalah keputusan tetap yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan (repitisi) perilaku dari pembuatnya dan mereka yang mematuhinya, merupakan hasil kompromi atau persaingan ide dan kepentingan dalam sistem politik.

Proses Kebijakan Publik

Menurut Michael Howlett dan M. Ramesh dalam buku Subarsono (2005: 107) yang berjudul Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan (siklus kebijakan) sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (agenda setting)
2. Formulasi kebijakan (policy formulation)
3. Pembuatan kebijakan (decition making)
4. Implementasi kebijakan (policy implementation)
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

*Corresponding author
E-mail addresses: adeliabamar@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan kedua dalam proses kebijakan publik setelah formulasi kebijakan disepakati, kemudian dilakukan implementasi. Secara sederhana proses implementasi sering diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah sebagai hasil dari pada formulasi sebuah kebijakan. Karena tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III (1980) dalam Widodo (2010:96) menyatakan bahwa ada 4 (empat) variable krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumber daya, watak atau sikap, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi Para Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

3. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan secara mendalam dengan melihat fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini fokus yang dibahas oleh peneliti adalah Implementasi Kebijakan dalam program lingkungan tinggal dan belajar aman untuk mendorong pencapaian cita-cita anak prasejahtera Di Kota Surabaya (Studi Kasus Pada UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya atau yang sekarang di kenal RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) dengan menggunakan Implementasi Kebijakan George Edward III (1980) yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Para Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Perwali ini menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur hal serupa, yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 mengatur tentang organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Sosial Surabaya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kampung Anak Negeri tidak berubah nama menjadi RIAS, melainkan kini terintegrasi sebagai bagian dari fasilitas yang lebih komprehensif yang disebut RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo). Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) mendirikan UPTD Kampung Anak Negeri pada tahun 2009 untuk menangani anak jalanan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus melalui pembinaan dan pendampingan. Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) memperkenalkan RIAS sebagai solusi terpadu untuk anak-anak rentan di Surabaya, di mana fasilitas Kampung Anak Negeri dan Asrama Bibit Unggul menjadi bagian yang terintegrasi di dalamnya. Jadi, "Kampung Anak Negeri" tetap ada sebagai unit di bawah Dinas Sosial, namun layanannya kini disinergikan dalam kerangka program RIAS yang lebih luas. (Terintegrasi adalah kondisi di mana berbagai komponen atau sistem yang berbeda telah disatukan dan saling terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi secara harmonis. Konsep ini berarti menggabungkan elemen-elemen terpisah untuk bekerja sama secara efisien dan terorganisasi).

Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi untuk menyediakan solusi pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau pra-sejahtera di Surabaya. Tujuan utama dari RIAS yaitu memberikan fasilitas pendidikan, pembinaan karakter, dan pengembangan bakat/minat secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak dan mencetak karakter bagi anak Surabaya sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pemimpin di masa depan.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi

   Kebutuhan anak merupakan tugas penting yang bisa dipenuhi oleh keluarga secara keseluruhan, dan kebutuhan keluarga bukan hanya dari seorang anak. Tetapi bagaimana keluarga tersebut siap memiliki seorang anak dan siap memenuhi semua kebutuhan nya. Hingga saat ini masih banyak keluarga yang egois menginginkan seorang anak tetapi tidak dengan memenuhi kebutuhan anak tersebut sehingga membuat mereka menjadi korban keegoisan orang tua yang ikut menjadi rentan miskin. Oleh karena itu, dari program kebijakan yang telah dibentuk para pemangku kebijakan berharap anak-anak yang hampir kehilangan harapan dalam pendidikan dapat memiliki harapan baru untuk mereka melanjutkan pendidikan sehingga menumbuhkan kembali semangat untuk pencapaian cita-cita anak pra-sejahtera.

   Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan program lingkungan tinggal dan belajar aman bagi anak pra-sejahtera dalam variabel komunikasi ini memberikan informasi bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya lebih memfokuskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan kebijakan program tersebut dan juga bagi orang tua mereka masih dapat mengetahui bagaimana perkembangan mereka di asrama yang telah disediakan dan juga bagaimana perkembangan mereka dalam pendidikan, mereka masih dapat bertemu orang tua apabila di izinkan.

2. Sumber Daya

   Adapun beberapa faktor sumber daya sebagai penunjang kelancaran dan efektivitas dalam implementasi kebijakan dalam penanganan dan pembinaan bagi anak pra-sejahtera melalui RIAS yakni sebagai berikut:

   a. Pertama, yaitu para staff atau pegawai, merupakan sumber daya yang kehadirannya sangat penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Jumlah staff yang sangat memadai mendorong keberhasilan dalam menjalankan penanganan bagi

*Corresponding author
E-mail addresses: adeliabamar@gmail.com



anak pra-sejahtera. Selain jumlah staff yang memadai Adapun keahlian dan potensi seorang staff juga harus diperhatikan karena keahlian sebuah kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

b. Kedua yakni dana atau anggaran, merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam keberlangsungan implementasi kebijakan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) itu sendiri sehingga tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup maka sebuah kebijakan ataupun program tidak akan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Disamping itu program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas atau akomodasi yang tersedia secara langsung di dalam proses kebijakan program yang memberikan sebuah kelayakan dan manfaat bagi para anak pra-sejahtera. RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) merupakan komunitas atau lembaga yang berfokus memberikan akses pendidikan, ketrampilan, dan sarana prasarana yang memadai bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan formal. Layanan fasilitas yang diberikan kepada anak pra-sejahtera dalam lingkungan tinggal yang aman dan pendidikan yang memadai, mereka diberikan fasilitas dari kehidupan sehari-hari dan kebutuhan untuk sekolah dari atas kepala hingga kaki dan juga kebutuhan buku, komputer ditempat tinggal dan lainnya. Fasilitas seperti kegiatan olahraga, kewirausahaan, pendidikan non-formal juga diberikan untuk mereka untuk perkembangan karakteristiknya. Fasilitas seperti transportasi mereka telah disediakan oleh pihak Dinas Perhubungan, mereka akan dijemput dan di antar kembali ke asrama. Untuk sekolah yang telah di tetapkan oleh pihak Instansi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

3. Disposisi Para Pelaksana

Adapun menurut George Edward III (1980) disposisi atau sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Pemberi penanganan dan pembinaan yang baik harus mempunyai sikap yang baik yang akan diberikan untuk anak-anak. Para pelaksana RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) memberikan sikap bagi anak-anak seperti selayaknya seorang teman, saudara dan juga bagi orangtua mereka. Para pelaksana memberikan ketegasan untuk mereka tetap memiliki sopan santun dan disiplin dalam menjalankan aturan sesuai yang ditetapkan. Bagi anak-anak kurang dalam hal kondisi diri para pelaksana akan memberikan sikap yang tegas dan selalu sabar dalam menangani para anak-anak dengan kondisi kekurangan.

4. Struktur Birokrasi

Hasil dari analisis mengenai struktur birokrasi yang mencakup sub indikator standar operasioanl prosedur, hubungan antar unit, dan struktur organisasi dengan hasil analisa struktur birokrasi yang telah dijalankan dan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan baik sebagai bentuk dari pelaksanaan untuk penanganan dan pembinaan bagi anak pra-sejahtera sebagai pendoman untuk menerapkan implementasi kebijakan tersebut. Kekurangan dalam struktur birokrasi tidak transparan dalam pemberi informasi bagi peneliti. Harapan untuk kedepannya bagi anak-prasejahtera memiliki harapan baru untuk tetap bisa menjalankan pendidikan tanpa harus merasa pupus harapan dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menggapai impian dan cita-cita mereka karena mereka adalah penerus Bangsa Indonesia.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam implementasi program lingkungan tinggal dan belajar aman bagi para anak pra-sejahtera yang diberikan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) melalui Dinas Sosial Kota Surabaya yang membetuk RIAS (Rumah Ilmu Arek Suroboyo) yang telah di sahkan pada bulan Juli 2025 dan memiliki lingkungan tinggal yang aman yaitu Asrama Bibit Unggul yang telah diresmikan pada bulan Agustus 2024 bagi para anak pra-sejahtera dalam upaya Pemkot untuk menyediakan alternatif solusi pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak pra-sejahtera. Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) adalah menjadi rumah kedua bagi anak kurang mampu atau pra-sejahtera di Surabaya untuk belajar dan dibina, dan telah menyediakan pendidikan yang berkualitas dan pembinaan karakter komprehensif agar anak-anak tersebut bisa menjadi pemimpin hebat di masa depan. RIAS berupaya mencetak generasi Surabaya dengan ilmu pengetahuan dan karakter kuat, yang didukung dengan fasilitas lengkap seperti transportasi, asrama, dan program pengembangan bakat.

Saran

Untuk meningkatkan daya dorong program dalam mencapai cita-cita anak pra-sejahtera di Kota Surabaya, fokus implementasi kebijakan yang efektif bukanlah sekadar serangkaian aturan, melainkan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan yang berdampak jangka panjang dalam potensi kemanusiaan. Mengenai anak pra-sejahtera di Surabaya, mewujudkan lingkungan tinggal dan belajar yang aman merupakan prasyarat mutlak (bukan lagi pilihan) untuk menjamin mereka memiliki kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita dan impian mereka. Keterbatasan ekonomi tidak menjadikan penghalang bagi keselamatan, kesehatan, dan akses pendidikan yang layak bagi anak pra-sejahtera. Oleh karena itu, langkah-langkah selanjutnya harus bertumpu pada prinsip keberlanjutan, kolaborasi lintas sektor, dan fokus pada pencegahan dini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2021). Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Surabaya: Sekretariat Daerah.

Anisah Puteri Djatmiko, Yusuf Hariyoko, & Adi Soesiantoro. (2024). Implementasi Program Pemeliharaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak (Studi Kasus UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo). Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 31–44. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.732

Oktavia, W. K., & Suwanda, I. M. (2022). Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Dalam Membentuk Warga Negara Yang Baik Pada Anak Jalanan Di Wonorejo Surabaya. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 10(4), 857–871. https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p857-871

*Corresponding author
E-mail addresses: adeliabamar@gmail.com



Rachma, D. T. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya. Prosiding Seminar Nasional, 662–672.

Septiana, P., & Listyaningsih. (2024). PEMBENTUKAN SIKAP PERCAYA DIRI PADA ANAK JALANAN DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI SURABAYA Septiana Putri Lestari Listyaningsih. Jurnal Informasi, 12(2), 331–347.

Talitha Zitha Vasthi, Bambang Kusbandrijo, & Supri Hartono. (2024). Evaluasi Pembinaan Program Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 3(2), 231–241. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1265

Tutesa, & Wisman, Y. (2020). Permasalahan Sosial Pada Masyarakat. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 12(2), 94–99. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/1920